

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kitab Kejadian pasal 1, menceritakan keagungan Allah dalam menciptakan alam semesta. Suatu hal yang spesial dari proses penciptaan ini adalah ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa-Nya sendiri (Kejadian 1:26-27) dan melalui kesaksian-Nya, segala sesuatu yang dijadikan-Nya sungguh amat baik (Kejadian 1:31).

Proses penciptaan kemudian dilanjutkan dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa. Manusia akhirnya memilih untuk jatuh kedalam dosa, terpisah dari pencipta-Nya, sesama manusia, diri mereka sendiri, alam, dan akibatnya mereka akan mati (Knight, 2009). Keberadaan natur manusia yang berdosa ini membuat manusia sulit memahami kehendak Tuhan yang berujung pada pemberontakan terhadap kehendak Tuhan tersebut. Manusia lebih memilih untuk melakukan apa yang dianggapnya benar daripada melakukan apa yang dikehendaki Tuhan.

Meskipun demikian, dalam keadaan yang sangat hina inipun, Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya untuk tetap memelihara umat manusia yang tidak kehilangan gambar dan rupa Allah dalam kejatuhannya. Peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus menjadi bukti rancangan Tuhan dalam memelihara umat-Nya dengan menyediakan kehidupan yang kekal bagi mereka yang percaya kepada-Nya dan bersedia hidup dalam kehendak-Nya.

Bagi setiap orang yang percaya kepada-Nya akan menyaksikan Allah yang bukan hanya sekedar Pencipta langit dan bumi tetapi lebih dari itu, Allah yang menopang seluruh keberadaan dan kehidupan ciptaan-Nya dan Allah-lah yang mengatur segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya (Berkhof, 2008). Kolose 1:16-17 menyatakan bagaimana kebesaran Allah sebagai Pencipta dan bagaimana segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini diciptakan dan diatur oleh Dia dan untuk kemuliaan-Nya sehingga melalui hal ini manusia dapat melihat apapun yang terjadi dalam kehidupannya bahkan setelah mengalami kejatuhan, dikemas secara teratur sesuai dengan kehendak-Nya sebagai bentuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan manusia.

Proses penciptaan, kejatuhan, penebusan, sampai pada pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan manusia seharusnya membuat manusia memahami keberadaan diri-Nya di hadapan Allah. Kelanjutan dari pemahaman ini membuat manusia ikut mengambil bagian secara aktif dalam rencana Allah. Sebagaimana yang tertulis dalam Roma 6:15-23 bahwa setelah manusia diberikan kasih karunia dalam karya penebusan Allah, manusia tidak dapat lagi menjadi hamba dosa meskipun natur keberdosaan ada dalamnya, tetapi manusia harus hidup dalam proses pengudusan dalam kebenaran Firman Tuhan yang menyatakan kehendak Allah. Proses pengudusan ini akan terus ada dalam kehidupan manusia sampai akhirnya manusia menikmati kehidupan kekal bersama Allah di dalam surga.

Proses pengudusan berlangsung dalam setiap aspek kehidupan manusia sebagaimana manusia ikut mengambil bagian dalam suatu lembaga atau kelompok tertentu. Salah satu lembaga yang sangat penting selama manusia hidup di dalam dunia ini adalah pendidikan. Dengan demikian, dibutuhkan suatu pendidikan yang

berbasis Kristen untuk membawa manusia kepada suatu pengertian yang benar mengenai setiap proses yang terjadi dalam kehidupannya (penciptaan, kejatuhan, penebusan, dan pengudusan).

“Pendidikan Kristen harus mampu menciptakan ruang dimana ketaatan terhadap kebenaran harus dijalankan” (Palmer, 1993, hal. 69). Ruang yang dimaksud bukanlah sekedar ruang secara fisik yang kita kenal dengan ruangan kelas atau bangunan sekolah yang di dalamnya siswa mengadakan interaksi dengan guru secara fisik tetapi lebih dari itu, ruang dalam hal ini haruslah dimengerti sebagai suatu keadaan secara fisik dan rohani yang di dalamnya sekolah secara keseluruhan memiliki pribadi-pribadi yang taat pada kebenaran Firman Tuhan. Menciptakan ruang seperti ini mungkin terlihat mengkondisikan pribadi-pribadi yang ada didalamnya untuk harus taat pada setiap kebijakan sekolah. Akan tetapi, yang diharapkan lebih lanjut melalui pengondisian ini adalah terciptanya suatu kebiasaan yang akan membentuk karakter ilahi dari setiap pribadi yang terlibat yaitu siswa dan guru.

Menurut Palmer (1993) ruang belajar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya hanya akan terwujud apabila telah memiliki tiga karakteristik yaitu *openness* (keterbukaan), *boundaries* (batasan), dan *hospitality* (keramahan). Salah satu dari tiga karakteristik tersebut yaitu *boundaries* (batasan) menunjukkan bahwa suatu ruang pendidikan Kristen tercipta melalui tegasnya suatu batasan yang dinyatakan melalui peraturan. Konsep ini dapat dilihat juga dalam pekerjaan tangan Tuhan yang memberikan batasan dalam kehidupan manusia mengenai hal-hal yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Dalam setiap batasan-Nya, Tuhan juga memberikan pengertian kepada manusia dan menyatakan alasan-

Nya kenapa hal itu boleh dilakukan dan yang ini tidak boleh dilakukan. Setiap hal ini dikerjakan Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi umat manusia yang dikasihi-Nya termasuk ketika Tuhan menegur dalam suatu bentuk pendisiplinan bagi umat-Nya.

Pendidikan Kristen yang telah dijelaskan di atas hanya akan terwujud jika setiap pihak yang ada di dalam suatu sekolah (kepala sekolah, guru, dan siswa) mengerjakan kewajiban dan tanggungjawabnya masing-masing. Hal ini haruslah berdasarkan pada suatu pengertian bahwa kewajiban dan tanggungjawab masing-masing pihak diberikan langsung dari Allah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam kehidupan manusia. Tuhan memberikan otoritas bagi manusia dalam rangka mengambil bagian dalam pekerjaan tangan Tuhan. Begitu pula bagi setiap pihak yang mengambil bagian dalam pendidikan Kristen di suatu sekolah.

Dalam pemahaman bahwa suatu pendidikan Kristen haruslah memiliki suatu batasan sebagai standar untuk hidup dalam ketaatan maka, kepala sekolah sebagai salah satu pihak yang ada di dalam pendidikan Kristen ini memiliki otoritas sebagai pihak yang menentukan batasan tersebut. *Boundaries* (batasan) ini diwujudkan melalui adanya peraturan dan konsekuensi sebagai suatu bentuk pendisiplinan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam membuat peraturan dan konsekuensi ini, kepala sekolah haruslah memiliki pengertian yang benar bahwa otoritasnya sebagai pimpinan sekolahpun itu dilaksanakan dalam kuasa Tuhan. Dalam pengertian ini, kepala sekolah dituntut untuk membuat peraturan dan konsekuensi sesuai dengan apa yang dinyatakan Tuhan dalam kehendak-Nya untuk kepentingan sekolah secara umum. Ketika hal ini telah dimengerti dengan

baik, barulah pihak yang ada di bawah bimbingan kepala sekolah dalam hal ini guru-guru dapat taat pada otoritas kepala sekolah.

Selain kepala sekolah yang bertanggung jawab dalam lingkungan sekolah secara umum, pihak lain yang selanjutnya memegang peran penting dalam pendidikan Kristen dan memiliki kewajiban yang sama tetapi lebih khusus di dalam kelas adalah guru. Menurut Van Brummelen (2006), “Tuhan memberikan wewenang kepada manusia dalam panggilannya sebagai guru untuk melakukan pendisiplinan melalui penerapan peraturan untuk memberikan pengertian dan hikmat tentang cara hidup” (hal. 68). Dengan adanya wewenang ini, guru tidak diharapkan menjadi sosok orang yang sangat otoriter di dalam kelas melainkan tetap menjalankan wewenangnya berdasarkan kasih yang telah terlebih dahulu dinyatakan Tuhan melalui hidupnya. Setiap kebijakan, prosedur dan peraturan yang dibentuk haruslah berdasarkan pada pengertian bahwa semuanya merupakan hasil dari adanya kuasa dan kebijaksanaan yang bersal dari Tuhan.

“Guru berperan sangat besar dalam pembentukan norma-norma siswa dalam kaitannya dengan pendidikan terhadap akal budi yang lebih lanjut mempunyai kekuatan yang sanggup mengubah hidup” (Sproul, 2005 hal. 151). Untuk itu, proses pembelajaran yang ada dalam kelas bukan hanya sekedar membagikan ilmu pengetahuan tetapi juga memberikan nilai-nilai kebenaran mengenai bagaimana seharusnya setiap siswa bersikap. Salah satu cara yang tepat adalah dengan membatasi perilaku siswa dalam suatu koridor yang benar melalui peraturan dan kesepakatan kelas yang tentunya memiliki konsekuensi.

Dengan demikian, setelah memahami otoritas kepala sekolah dan guru maka, selanjutnya akan menghasilkan ketaatan siswa kepada otoritas guru selama proses belajar mengajar berlangsung ataupun selama siswa berada dalam lingkup sekolah secara umum selama jam sekolah. Melalui peraturan dan konsekuensi yang ada, setiap pribadi dalam komunitas sekolah dapat menjalankan perannya masing-masing dengan hidup dalam ketaatan kepada otoritas yang ada.

Melihat kebutuhan di atas, SMA X merasa perlu untuk membentuk suatu peraturan dan memberikan konsekuensi *detention* sebagai bentuk pendisiplinan ketika ada suatu peraturan yang dilanggar oleh siswa (Lampiran C-1). Berdasarkan penjelasan sebelumnya, suatu komunitas pendidikan Kristen harus menyediakan ruang untuk ketaatan setiap pribadi bukan hanya siswa. Untuk itu, program *detention* yang ditetapkan oleh sekolah ini haruslah didukung dengan adanya ketaatan dari kepala sekolah, guru, dan siswa untuk mengikuti prosedur pelaksanaan program *detention*.

Detention adalah salah satu bentuk pendisiplinan yang biasanya digunakan oleh satu sekolah yang mengharuskan siswa untuk menerima konsekuensi ketika jam sekolah berakhir atau selama jam istirahat berlangsung (Sprick, 2013). Dalam SMA X, *detention* dilakukan ketika jam sekolah berakhir. Program pendisiplinan ini merupakan program pendisiplinan yang berlaku secara umum di sekolah, tetapi guru diberikan wewenang untuk membuat peraturan di dalam kelas yang di dalamnya memiliki konsekuensi *detention* bila siswa tidak menaatinya.

“Proses pendisiplinan tidak dilakukan secara kasar dan seharusnya tidak menyebabkan kepahitan karena tidak dilakukan dengan cara yang kurang mulia

melainkan memberi pengampunan” (Van Brummelen 2006, hal. 68). Layaknya Tuhan yang dengan sabar memberikan peringatan dan pengampunan kepada manusia yang dikasihi-Nya, peraturan yang ada di dalam SMA X juga memiliki proses yang sama sebelum siswa yang melakukan pelanggaran akhirnya diberikan konsekuensi *detention*. Peraturan yang dibentuk melalui beberapa peringatan sebelum guru atau pihak sekolah memberikan konsekuensi bertujuan untuk memperingati siswa bahwa ada konsekuensi di balik pelanggaran yang dilakukannya secara berulang-ulang yang telah mendapatkan pengampunan untuk kesekian kalinya.

Kasih dalam pendisiplinan juga menjadi nyata dalam program *detention* yang mengharuskan siswa untuk tetap berada di sekolah di luar jam sekolah untuk berefleksi mengenai hal-hal apa saja yang telah dilakukannya sehingga dia harus mendapatkan konsekuensi *detention*. Konsekuensi tidak diberikan secara fisik dengan perlakuan kasar tetapi melalui kegiatan refleksi, siswa diharapkan dapat memahami kesalahannya dan dapat menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Knight (2009) yang menyatakan bahwa “ajaran Kristus mengenai perlunya pemeriksaan diri, pengakuan dosa, dan bersandar pada kebenaran-Nya dapat dipandang sebagai cara untuk mengembalikan orang pada pandangan diri yang benar” (hal. 249). Inilah yang diharapkan dapat dicapai melalui program *detention* ini.

Ketika penulis melakukan observasi di SMA X selama kegiatan praktikum dan dengan mempertimbangkan setiap hal yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis melihat betapa pentingnya program *detention* yang dijalankan oleh

sekolah. Untuk itu, penulis memutuskan untuk melaporkan program *detention* yang diterapkan di SMA X.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan program *detention* di SMA X?
2. Bagaimana hasil dari penerapan program *detention* di SMA X?

1.3. Tujuan Laporan magang

Tujuan laporan magang ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana program *detention* yang selama ini telah dijalankan oleh SMA X.
2. Untuk mengetahui hasil dari penerapan program *detention* di SMA X.

1.4. Manfaat Laporan magang

Bagi sekolah, laporan magang ini bermanfaat untuk:

1. Evaluasi penerapan program *detention* dalam hal pelaksanaan prosedur teknis.
2. Melihat ketercapaian tujuan yang diharapkan melalui penerapan program *detention*.
3. Dapat menjadi bahan evaluasi secara pribadi bagi setiap pihak sekolah (guru dan siswa) yang terlibat dalam program ini sehingga masing-masing pihak dapat memberikan kontribusi yang lebih baik.

1.5. Penjelasan Istilah

Variabel: *Detention* adalah salah satu bentuk pendisiplinan yang biasanya digunakan oleh satu sekolah yang mengharuskan siswa untuk menerima

konsekuensi ketika jam sekolah berakhir atau selama jam istirahat berlangsung (Sprick, 2013 hal. 124).

Indikator:

1. Guru memiliki peraturan dan prosedur kelas yang sudah disepakati bersama dengan siswa dan memiliki konsekuensi *detention*.
2. Guru memberikan *detention* bagi siswa yang melakukan pelanggaran secara berulang yaitu sebanyak tiga kali atau lebih.
3. Guru memberitahu koordinator *detention* nama-nama siswa yang akan diberikan *detention*.
4. Wali kelas memberikan tiga slip after school *detention* kepada siswa yang melakukan pelanggaran untuk ditandatangani orangtua sehari sebelum *detention*.
5. Siswa menunjukkan slip *after school detention* kepada guru piket pada saat melakukan *detention*.
6. Koordinator *detention* memberikan slip after school *detention* ke konselor.
7. Wali kelas, siswa/orangtua, dan *team leader*/konselor menyimpan salah satu slip after school *detention*.
8. Guru mendata setiap siswa yang dikenakan *detention* di buku *subject journal, class journal, dan homeroom journal*.
9. Mengadakan *detention* sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan yaitu hari Selasa & Kamis 15.30-17.00 di ruangan guru koordinator.
10. Guru piket memberikan daftar hadir siswa yang *detention* pada hari itu untuk ditandatangani siswa.

11. Siswa melakukan *detention* dengan teratur dan tenang.
12. Guru piket memberikan lembar refleksi yang harus dilengkapi siswa selama *detention*.
13. Guru mendiskusikan hal-hal penting yang harus diperhatikan siswa sesuai dengan jawaban siswa dalam lembar refleksi.
14. Siswa membaca buku yang telah disediakan guru piket.
15. Siswa membuat ringkasan cerita dari buku yang dibaca di lembar tugas yang disediakan guru piket.
16. Siswa melakukan kegiatan sosial yang ditentukan oleh guru piket/ koordinator *detention*.
17. Guru piket memberikan hasil *detention* siswa kepada koordinator *detention* (Mr.Yudhi).
18. Wali kelas berkoordinasi dengan konselor untuk pembinaan lebih lanjut bagi siswa yang melakukan pelanggaran yang berulang.
19. Guru memberikan surat peringatan dan sanksi (siswa dirumahkan) bagi siswa yang tidak mengikuti *detention* sebanyak tiga kali berturut-turut.
20. Koordinator *detention* mengarsipkan dan menyerahkan hasil *detention* siswa kepada kepala sekolah dan wali kelas.
21. Kepala sekolah dan wali kelas memiliki arsip lembar hasil refleksi siswa.
22. Siswa mematuhi peraturan sekolah dan kelas.